

Paradigma Melayu Menatap Hari Esok: Membasmi Kemiskinan Suatu Keharusan

Oleh : Muhammad Elsa Tomisa, SE.I
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis
Email: elsatomisa@gmail.com

Abstrak

Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini juga selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan, tetapi dalam kenyataannya kemiskinan tidak pernah berkurang secara signifikan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan di provinsi Riau penduduk miskin pada Maret 2014 sebesar 499,89 ribu jiwa (8,12 persen). Jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2013 yang berjumlah 462,67 ribu jiwa (7,72 persen), penduduk miskin di Riau mengalami kenaikan sebanyak 37,22 ribu jiwa selama periode Maret 2013 sampai dengan Maret 2014, penduduk miskin di daerah perdesaan bertambah 15,09 ribu jiwa, dan di daerah perkotaan juga mengalami penambahan sebesar 22,12 ribu jiwa. Apa usaha yang telah dilakukan, kepada siapa rakyat ingin menuding jari. Apakah kepada pemerintah pusat/daerah yang tidak bertanggungjawab, atau kepada siapa? Langkah awal yang kongkrit dalam membangun ekonomi untuk membasmi/merentas kemiskinan dengan konsepsi pemberdayaan masyarakat, yaitu : *Pertama*, menerapkan ekonomi Islam. *Kedua*, persiapan mental masyarakat (revolusi mental). *Ketiga*, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*).

Kata kunci: Membasmi kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, ekonomi Islam.

A. Pendahuluan

Dari undang-undang Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, sampai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta dengan segala bentuk perundangan tentang kewenangan pemerintah daerah yang mengisyaratkan provinsi, kabupaten/kota sebagai daerah otonom, semua ini bertujuan untuk perubahan paradigma pembangunan nasional dari paradigma pertumbuhan menjadi paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Dilingkup ini tidak terkecuali disektor ekonomi, undang-undang tersebut memberikan wewenang kepada daerah dalam membangun daerahnya melalui usaha-usaha yang sejauh mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakatnya, agar tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dapat tercapai, yakni menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat dan memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan daerah.

Dengan demikian, upaya untuk memantapkan kemandirian pemerintah daerah yang dinamis dan bertanggung jawab, serta mewujudkan pemberdayaan dan otonomi

daerah dalam lingkup yang lebih nyata, maka diperlukan aksi nyata pula dalam melaksanakan tiga misi tersebut. Di samping itu, diperlukan juga upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan profesionalisme sumber daya manusia dan lembaga-lembaga publik di daerah dalam mengelola sumber daya daerah. Dan upaya-upaya untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya daerah harus dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sehingga otonomi yang diberikan kepada daerah akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jika kita lihat dari tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah tersebut sangat cantik nan elok, namun sangat disayangkan amanat undang-undang tersebut tidak sejalan dengan apa yang terjadi di daerah. Kita ambil contoh provinsi Riau, daerah yang kaya hasil bumi akan tetapi hanya mewariskan rakyat miskin. Ini dibuktikan dengan jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan) di Riau Maret 2014 sebesar 499,89 ribu jiwa (8,12 persen). Jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2013 yang berjumlah 462,67 ribu jiwa (7,72 persen), penduduk miskin di Riau mengalami kenaikan sebanyak 37,22 ribu jiwa.¹

Perubahan budaya yang besar diperlukan dalam membangun ekonomi masyarakat pribumi Riau. Walaupun pemerintah pusat maupun daerah telah menjalankan program ekonomi kerakyatan, namun satu loncatan tinggi perlu dibuat untuk menyeberangi jurang yang memisahkan budaya petani dan bedagang kecil-kecilan kepada budaya masyarakat komersial yang canggih. Program ekonomi kerakyatan yang dibuat dengan memberikan modal kepada masyarakat hendaknya diiringi dengan perencanaan, pembinaan dan pengawasan agar usaha yang dijalankan oleh masyarakat tidak menjadi "*bedagang buluh kasab, ujung hilang pangkal lesap*" artinya kerja/usaha yang dilakukan tidak mendatangkan hasil. Diharapkan dengan perencanaan, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan akan tercipta pembangunan ekonomi yang maju serta dapat mengangkat taraf hidup masyarakat, terlepas dari belenggu kemiskinan dan kesengsaraan.

Tanggungjawab membangun dan memajukan ekonomi Riau bukan terletak pada bahu pemerintah daerah saja, tetapi perlu kerjasama yang jitu dari masyarakat. Karena betapapun peluang disediakan jika semangat masyarakat pribumi masih dalam lingkaran lama, maka kejayaan pembangunan ekonomi sukar diwujudkan.

Persoalan pengentasan kemiskinan membutuhkan semacam sistem ekonomi yang bersifat inklusif. Tidak hanya sistem yang memihak kepada pemodal (kapital) seperti sistem kapitalis. Dalam sistem kapitalis, urusan ekonomi diserahkan kepada individu secara keseluruhan dan peran negara hanya sebagai penjaga keamanan aktifitas ekonomi. Sistem ini pada umumnya banyak diterapkan di negara-negara barat sebagai pendukung kapitalisme. Negara penganut sistem ekonomi kapitalis memposisikan unit-unit produksi sebagai alat untuk memproduksi sarana-sarana kemewahan hidup dan guna memuaskan keserakahan. Sementara itu, permintaan

¹ Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Riau pada Maret 2014 adalah 499,89 ribu atau 8,12 persen dari total penduduk. <http://riau.bps.go.id>. 04/07/2014

masyarakat miskin yang kian meningkat akan bahan-bahan pokok dan berbagai sarana untuk mempertahankan hidup terus terbengkalai.²

Saat ini sistem ekonomi kapitalis, boleh dikatakan telah gagal untuk mensejahterakan umat manusia, barang kali karena sistem ini selalu individualistik, dan menolak pertimbangan moral yang dikaitkan dengan agama, dan oleh karena itu gagal memecahkan isu-isu yang berhubungan dengan kesejahteraan umat manusia yang membutuhkan pertimbangan moral.³ Sifat individualistik dalam sistem ekonomi kapitalis mendapat kritik tajam oleh Karl Mark yang memandang bahwa sistem ekonomi kapitalis adalah sistem yang tidak manusiawi. Oleh karena itu Karl Mark mengusulkan sebuah sistem ekonomi tanpa kelas, tanpa hak milik pribadi, tanpa kasta, tanpa kerakusan, non diskriminatif dan tidak ada yang menguasai dan tidak ada yang dikuasai. Kehidupan benar-benar sama untuk semua. Sistem inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya sistem ekonomi sosialis.

Dalam sistem ekonomi sosialis kebebasan individu dalam memanfaatkan sumber daya dibatasi oleh Negara. Sehingga menimbulkan permasalahan kecenderungan terjadinya monopoli yang berdampak pada keterbatasan hak-hak individu masyarakat. Dengan demikian apabila monopoli Negara ditujukan untuk mencapai kepuasan kebendaan yang menjadi tujuan utama dan mengesampingkan nilai-nilai moral, maka sistem ini akan menjadi lebih berbahaya daripada sistem ekonomi kapitalis.

Sistem ekonomi tidak boleh lepas dari nilai-nilai moral dan etika. Dimensi moral jika ditanamkan didalam sistem ekonomi atau sistem finansial tentu akan melahirkan keadilan. Dan ini menjadi sebuah dampak positif dalam permasalahan pengentasan kemiskinan. Lalu timbul sebuah pertanyaan, sistem ekonomi yang seperti apa yang mengedepankan aspek dimensi moral dan etika?. Tentu jawabannya adalah sistem ekonomi Islam.

B. Membasmi Kemiskinan Suatu Keharusan

Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini juga selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan, tetapi dalam kenyataannya kemiskinan tidak pernah berkurang secara signifikan, orang miskin bertambah miskin dan yang kaya semakin kaya. Semangat untuk mengentaskan kemiskinan cenderung muncul dari hawa nafsu yang banyak dipengaruhi oleh berbagai kepentingan, mulai dari kepentingan pribadi atau individu yang memegang kekuasaan hingga kepentingan asing. Alhasil, sampai sekarang dan mungkin sampai hari kiamat, kemiskinan tersebut akan terus meningkat dan muncul dengan berbagai varian penyebabnya.

² Muhammad Baqir Ash Shadr, *Our Economics*, alih bahasa Yudi, Cet.1 (Jakarta: Zahra, 2008), hal.450.

³ Asmuni Mth, *Etika Ekonomi Perspektif al-Maqasid*, Jurnal Hukum Bisnis Islam Az-Zarqa', Vol.III (2011), hal. 182.

Kalau kita perhatikan data kemiskinan di Provinsi Riau berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan selama periode Maret 2013 sampai dengan Maret 2014, penduduk miskin di daerah pedesaan bertambah 15,09 ribu jiwa, dan di daerah perkotaan juga mengalami penambahan sebesar 22,12 ribu jiwa. Hal ini bertolak belakang dengan pandangan banyak ekonom yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan pada akhirnya mengurangi penduduk miskin. Dari data-data di atas sangat mengerikan bagi umat Islam, karena sebagian besar yang termasuk kategori miskin adalah masyarakat muslim. Sangat menyedihkan karena banyaknya orang Islam yang miskin, padahal mayoritas pemimpin kita muslim.

Apa usaha yang telah dilakukan, kepada siapa rakyat ingin menuding jari. Apakah kepada pemerintah pusat/daerah yang tidak bertanggungjawab, atau kepada siapa? Mungkin kita tidak perlu pertikaikan siapa yang salah, mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi negeri ini menjadi hal yang paling penting.

Salah satu sebab, kegagalan melaksanakan sistem ekonomi yang mengakibatkan kemiskinan dan kesengsaraan, baik sistem ekonomi sosialis yang berporos pada begitu besarnya peran pemerintah terhadap kehidupan rakyat, yang kemudian runtuh dengan tumbangannya rezim komunis Uni sovyet, juga ekonomi kapitalis, yang menyebabkan kekayaan terpusat pada segelintir orang atau negara, dan menyebabkan semakin besarnya gap/ketimpangan antara kaya dan miskin, membuat banyak orang kemudian berfikir untuk terus mencari alternatif sistem ekonomi yang dapat memecahkan masalah akibat kegagalan dua sistem tersebut.

Kemiskinan dapat didefinisikan suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan, dan lain-lain.

Faktor utama penyebab kemiskinan adalah sikap berdiam diri, enggan, atau tidak dapat bergerak dan berusaha. Keengganan berusaha adalah penganiayaan terhadap diri sendiri, sedang ketidakmampuan berusaha antara lain disebabkan oleh penganiayaan manusia lain. Ketidakmampuan berusaha yang disebabkan oleh orang lain diistilahkan pula dengan kemiskinan struktural. Kesan ini lebih jelas lagi bila diperhatikan bahwa jaminan rezeki yang dijanjikan Tuhan, ditujukan kepada makhluk yang dinamainya dabbah, yang arti harfiahnya adalah yang bergerak. Setiap orang memiliki potensi untuk maju dan merubah keadaannya. Seseorang tidak mungkin bisa berubah kecuali kalau dia sendiri merubah dirinya. Allah akan memberi rezeki pada setiap orang yang berusaha untuk mendapatkannya rezeki-Nya. Mungkin pernah terlintas dibenak kita sebagai umat Islam bahwa kemiskinan yang dialami seseorang disebabkan karena keturunan dan mungkin tidak bisa berubah.

Pikiran tersebut adalah pikiran yang salah. Karena manusia bisa saja merubah nasibnya kalau dia memiliki keinginan untuk mengubahnya.

C. Sistem Ekonomi Islam

Sistem adalah serangkaian unsur yang saling berhubungan dan berinteraksi, unsur-unsur tadi tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Sistem yang dimaksudkan disini adalah sistem ekonomi. Dapat didefinisikan bahwa sistem ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan yang berdampak pada kehidupan masyarakat baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek.

Dari definisi diatas memiliki beberapa sifat penting yaitu; i) suatu proses, yang merupakan perubahan yang terjadi secara terus menerus, ii) sesuatu yang dapat merubah tingkat penghidupan masyarakat. Selain itu sistem ekonomi juga dikaitkan dengan manajemen distribusi kekayaan dalam suatu masyarakat yang cenderung menyelesaikan permasalahan-permasalahan perekonomian dari beragam kelompok dengan memungkinkan atau melarang mereka memanfaatkan sarana-sarana produksi dan kepuasan. Oleh karena itu, sistem ekonomi harus harus mencakup tiga elemen utama seperti;⁴

1. Kepemilikan properti, komoditas, dan kekayaan
2. Pemberian kepemilikan
3. Distribusi kekayaan di antara orang-orangnya

Pendapat lain juga menegaskan bahwa sistem ekonomi adalah cara suatu bangsa atau negara dalam menjalankan perekonomiannya. Chester A Bemand mengatakan bahwa : "Sistem ekonomi adalah suatu kesatuan yang terpadu yang secara kolektif yang di dalamnya ada bagian-bagian dan masing-masing bagian itu memiliki ciri dan batas tersendiri". Menurut M. Hatta : "Sistem ekonomi yang baik untuk diterapkan di Indonesia harus berdasarkan atas asas kekeluargaan".

Elemen dari suatu sistem ekonomi mencakup beberapa hal yaitu :

1. Unit-unit ekonomi seperti: rumah tangga, perusahaan, serikat buruh, instansi pemerintah dan lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi.
2. Pelaku-pelaku ekonomi seperti: konsumen, produsen, buruh, investor dan pejabat-pejabat yang terkait.
3. Lingkungan sumber daya alam dan sumber daya manusia, sumber daya kapital, sumber daya teknologi.

Sistem ekonomi dapat berfungsi sebagai :

- a) Sarana pendorong untuk melakukan produksi
- b) Cara atau metode untuk mengorganisasi kegiatan individu
- c) Menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi barang dan jasa terlaksana dengan baik.

⁴ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, alih bahasa Aditya Wisnu Pribadi, (Jakarta: PT. Gramedia, 2009), hal. 15.

Prinsip dasar sistem ekonomi Islam, yakni:⁵

- a) Kebebasan individu. Individu mempunyai hak kebebasan sepenuhnya untuk berpendapat atau membuat sesuatu keputusan yang dianggap perlu dalam sebuah negara Islam.
- b) Hak terhadap harta. Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta. Walaupun begitu ia memberikan batasan tertentu supaya kebebasan itu tidak merugikan kepentingan masyarakat umum.
- c) Ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar. Islam memberikan batas-batas wajar, adil dan tidak berlebihan.
- d) Keamanan sosial. Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi tetapi ia mendukung dan menggalakkan kesamaan sosial.
- e) Jaminan sosial. Setiap individu mempunyai hak untuk hidup dalam sebuah negara Islam dan dijamin oleh negara.
- f) Distribusi kekayaan secara meluas. Islam mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok kecil tertentu orang dan menganjurkan distribusi kekayaan pada semua lapisan masyarakat.
- g) Larangan menumpuk kekayaan. Sistem ekonomi Islam melarang individu mengumpulkan harta kekayaan secara berlebihan dan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mencegah perbuatan yang tidak baik tersebut.
- h) Larangan terhadap organisasi anti sosial. Sistem ekonomi Islam melarang semua praktek yang merusak dan antisosial yang terdapat dalam masyarakat, misalnya berjudi, minum arak, riba, menumpuk harta, pasar gelap dan sebagainya.
- i) Kesejahteraan individu dan masyarakat. Islam mengakui kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial masyarakat yang saling melengkapi satu dengan yang lain, bukannya saling bersaing dan bertentangan antar mereka.

Pada prinsipnya di dalam sistem ekonomi Islam memuat nilai-nilai etika dan norma yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama makhluk-Nya. Norma Tuhan tersebut yang termaktub di dalam kitab suci al-Qur'an mengatur segala aspek di dalam ilmu ekonomi termasuk dalam permasalahan kemiskinan.

D. Cara Islam Mengatasi Kemiskinan : Akar Kemiskinan

Isu kemiskinan dan pengangguran kembali mencuat dan mendapat perhatian banyak pihak pasca pidato kontroversial Presiden SBY pada 16 Agustus 2006 lalu di depan DPR. Terlepas dari perdebatan yang terjadi tentang kesahihan data kemiskinan, momentum ini sebenarnya lebih penting digunakan untuk mendorong kembali wacana strategi pengentasan kemiskinan yang tepat untuk Indonesia.

Kemiskinan yang melanda dunia Islam dalam perspektif Qur'ani telah diidentifikasi oleh Ul-Haq (1996), sebagai berikut:

⁵ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soeroyo, Jilid I, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995, hal.8.

- 1) Kemiskinan yang dialami masyarakat Islam adalah disebabkan oleh ketidaktaatan terhadap ajaran Ilahi. Ini misalnya terjadi akibat ada segolongan manusia yang memakan harta anak yatim (Q.S. Al-Maun: 1-7) dan membiarkan anak-anak yatim yang belum *akil baligh* untuk mengurus hartanya (Q.S. An-Nisa': 6).
- 2) Kemiskinan terjadi bukan karena kekurangan atau kelangkaan sumber daya alam, tetapi disebabkan tangan manusia sendiri. Firman Allah SWT; dan apa saja yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri... (Q.S. As-Syura: 30).
- 3) Kemiskinan itu terjadi akibat tidak bertanggungjawabnya orang kaya terhadap ureung miskin. Allah berfirman; dan yang mengumpulkan harta kekayaan lalu menyimpannya (dengan tidak membayar zakatnya) (Q.S. Al-Ma'arij: 18); dan Kamu telah dilalaikan (daripada mengerjakan amal bakti) oleh perbuatan berlumba-lumba untuk mendapat dengan sebanyak-banyaknya (harta benda, anak-pinak, pangkat dan pengaruh) (Q.S. At-Takatsur: 1).
- 4) Kemiskinan itu disebabkan oleh praktek diskriminasi alokasi hasil eksplorasi sumber daya alam oleh segolongan manusia terhadap golongan yang lain (Q.S. Ali Imran: 180; At-Taubah: 34; Al-Anfal: 8 & 40, dan Al-Hadid: 7).
- 5) Kemiskinan itu terjadi akibat daripada sikap manusia yang malas bekerja. Manusia selalu rugi (Q.S. Al-'Ashr: 1-3) tanpa mau bekerja (Q.S. Al-Jum'ah: 10) dan meminta-minta adalah pekerja terkutuk (Q.S. Al-Haqq: 34).
- 6) Kemiskinan itu terjadi akibat terkonsentrasinya kekuasaan politik dan ekonomi pada golongan tertentu. Ini dapat dilihat dari kisah Fir'aun dengan kaum Israil di Mesir dan cerita perbedaan kesejahteraan yang eksis antara warga Mekkah dan kaum Quraisy pada zaman Rasulullah SAW. Inilah sebabnya zakat diwajibkan agar harta itu tidak terkonsentrasi pada golongan tertentu saja. Demikian pula, institusi *syura* (musyawarah) seharusnya dapat dioptimalkan dalam menyelesaikan permasalahan umat sehingga konsentrasi kekuasaan politik oleh golongan elit dapat dihilangkan.
- 7) Kemiskinan itu terjadi akibat pengeksploitasian dan penindasan baik dalam aspek sosial, politik dan ekonomi oleh golongan tertentu atas golongan lainnya. Ini dapat dilihat dari sistem perbudakan (*slavery*) dan praktek riba dalam sistim pinjam-meminjam yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Realitas ini telah mendorong Karl Marx menulis bahwa, orang-orang kaya senantiasa mengeksploitasi buruh dan modalnya untuk memperkaya diri sendiri tanpa pernah terpikirkan untuk mengentaskan kemiskinan yang mendera kaum lemah.
- 8) Kemiskinan itu terjadi akibat malapetaka dan perang. Kondisi ini seperti dikisahkan al-Qur'an tentang kemiskinan yang dialami para korban perang yang telah diusir dari kampung halamannya (Q.S. Al-Hasyr: 8-9).

Dengan memahami akar masalah, akan lebih mudah bagi kita untuk memahami fenomena kemiskinan yang semakin meraja di sekeliling kita. Bukankah akar kemiskinan di negeri ini adalah perilaku eksploitatif akibat penerapan bunga sehingga kita setiap tahunnya harus menghabiskan sebagian besar anggaran negara untuk membayar bunga utang dan sektor riil harus collapse tercekik bunga tinggi perbankan? Bukankah akar kemiskinan di negeri ini adalah birokrasi yang korup dan

pemusatan kekuasaan di tangan kekuatan politik dan pemilik modal sehingga tidak jelas lagi mana kepentingan publik dan mana kepentingan pribadi? Bukankah akar kemiskinan di negeri ini adalah buah dari kejahatan kita terhadap lingkungan yang kita rusak sedemikian masif dan ekstensif?

E. Strategi Islam Pengentasan Kemiskinan

Islam memiliki berbagai prinsip-prinsip terkait kebijakan publik yang dapat dijadikan panduan bagi program pengentasan kemiskinan dan sekaligus penciptaan lapangan kerja. Pertama, Islam mendorong pertumbuhan ekonomi yang memberi manfaat luas bagi masyarakat (*pro-poor growth*).

Islam mencapai *pro-poor growth* melalui dua jalur utama: pelarangan riba dan mendorong kegiatan sektor riil. Pelarangan riba secara efektif akan mengendalikan inflasi sehingga daya beli masyarakat terjaga dan stabilitas perekonomian tercipta. Pada saat yang sama, Islam mengarahkan modal pada kegiatan ekonomi produktif melalui kerjasama ekonomi dan bisnis seperti mudharabah, muzara'ah, dan musaqat. Dengan demikian, tercipta keselarasan antara sektor riil dan moneter sehingga pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung secara berkesinambungan.

Kedua, Islam mendorong penciptaan anggaran negara yang memihak kepada kepentingan rakyat banyak (*pro-poor budgeting*). Dalam sejarah Islam, terdapat tiga prinsip utama dalam mencapai *pro-poor budgeting* yaitu: disiplin fiskal yang ketat, tata kelola pemerintahan yang baik, dan penggunaan anggaran negara sepenuhnya untuk kepentingan publik.

Tidak pernah terjadi defisit anggaran dalam pemerintahan Islam walau tekanan pengeluaran sangat tinggi, kecuali sekali pada masa pemerintahan Nabi Muhammad SAW karena perang. Yang lebih banyak didorong adalah efisiensi dan penghematan anggaran melalui *good governance*. Di dalam Islam, anggaran negara adalah harta publik sehingga anggaran menjadi sangat responsif terhadap kepentingan orang miskin, seperti menyediakan makanan, membayar biaya penguburan dan utang, memberi pinjaman tanpa bunga untuk tujuan komersial, dan beasiswa bagi yang belajar agama.

Ketiga, Islam mendorong pembangunan infrastruktur yang memberi manfaat luas bagi masyarakat (*pro-poor infrastructure*). Islam mendorong pembangunan infrastruktur yang memiliki dampak eksternalitas positif dalam rangka meningkatkan kapasitas dan efisiensi perekonomian. Nabi Muhammad SAW membagikan tanah di Madinah kepada masyarakat untuk membangun perumahan, mendirikan pemandian umum di sudut kota, membangun pasar, memperluas jaringan jalan, dan memperhatikan jasa pos. Khalifah Umar bin Khattab membangun kota Kufah dan Basrah dengan memberi perhatian besar pada infrastruktur dan tata ruang kota. Beliau juga memerintahkan Gubernur Mesir, Amr bin Ash, untuk mempergunakan sepertiga penerimaan Mesir untuk pembangunan jembatan, kanal, dan jaringan air bersih.

Keempat, Islam mendorong penyediaan pelayanan publik dasar yang berpihak pada masyarakat luas (*pro-poor public services*). Terdapat tiga bidang pelayanan publik yang mendapat perhatian Islam secara serius: birokrasi, pendidikan, dan kesehatan. Di dalam Islam, birokrasi adalah amanah untuk melayani publik, bukan untuk kepentingan diri sendiri atau golongan. Khalifah Usman tidak mengambil gaji dari kantor-nya. Khalifah Ali membersihkan birokrasi dengan memecat pejabat-pejabat publik yang korup. Selain itu, Islam juga mendorong pembangunan pendidikan dan kesehatan sebagai sumber produktivitas untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Nabi Muhammad SAW meminta tebusan bagi tawanan perang dengan mengajarkan baca tulis kepada masyarakat. Nabi Muhammad juga menyuruh masyarakat berperilaku hidup bersih dan memerintahkan agar orang sakit dikarantina hingga sembuh untuk mencegah penyebaran penyakit.

Kelima, Islam mendorong kebijakan pemerataan dan distribusi pendapatan yang memihak rakyat miskin (*pro-poor income distribution*). Terdapat tiga instrument utama dalam Islam terkait distribusi pendapatan yaitu aturan kepemilikan tanah, penerapan zakat, serta menganjurkan qardul hasan, infak, dan wakaf. Islam mengatur bagi setiap orang yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi milik-nya. Dan bagi siapa saja yang menelantarkan tanahnya, maka negara berhak mengambilnya untuk kemudian memberikan kepada orang lain yang siap mengolah-nya. Dengan penerapan zakat, maka tidak akan ada konsentrasi harta pada sekelompok masyarakat. Zakat juga memastikan bahwa setiap orang akan mendapat jaminan hidup minimum sehingga memiliki peluang untuk keluar dari kemiskinan. Lebih jauh lagi, untuk memastikan bahwa harta tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja, Islam juga sangat mendorong orang kaya untuk memberikan qard, infak, dan wakaf.

Demikianlah Islam mendorong pengentasan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, fokus pada pengembangan sektor riil, dan pemerataan hasil-hasil pembangunan.

F. Sistem Ekonomi Kerakyatan vs Sistem Ekonomi Islam

Sektor usaha kecil menengah ternyata memiliki daya tahan yang tinggi sehingga mampu bertahan terhadap badai krisis ekonomi dan moneter. Pembinaan dan perlindungan usaha kecil menengah, terutama pada masa krisis ini sangat strategis karena diperkirakan akan dapat menghasilkan nilai tambah (*value added*) yang memadai karena unit usahanya yang cukup banyak. Dengan usaha kecil menengah, akan terserap banyak tenaga kerja melalui usaha padat karya (*labour intensive*), dan dapat memperluas kesempatan berusaha dan memperoleh pemerataan pendapatan.

Salah satu alasan mengapa ekonomi kerakyatan perlu dijadikan paradigma baru dan strategi baru dalam membangun ekonomi adalah karena kegagalan pelaksanaan sistem ekonomi. Indonesia, negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis, pun mengalami hal serupa, dengan krisis yang berkepanjangan yang sampai saat ini bahkan belum seorang ahlipun yang memastikan bahwa indonesia telah keluar dari

krisis. Saat ini, berjuta-juta orang menganggur, puluhan juta orang berada dibawah garis kemiskinan, sektor moneter yang semakin jauh dari sektor rill sehingga berpotensi meledakkan *bubble economic* yang sudah terbentuk, dan berbagai macam masalah melingkupi kehidupan perekonomian kita. Ini pula yang menyebabkan bangsa ini kembali berfikir untuk mencari alternatif sistem ekonomi yang lebih dapat mensejahterakan rakyat. Ekonomi Islam yang sebenarnya sudah ada ribuan tahun yang lalu (sejak jaman Rasulullah) perlahan kembali bangkit dan menggeliat. Ekonomi kerakyatan, sebagai khazanah asli pemikiran ekonom indonesia pun mulai diperbincangkan orang.

Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Dimana ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan (popular) yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya, yang selanjutnya disebut sebagai Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terutama meliputi sektor pertanian, peternakan, kerajinan, makanan, dan sebagainya, yang ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya.

Secara ringkas Konvensi ILO169 tahun 1989 memberi definisi ekonomi kerakyatan adalah ekonomi tradisional yang menjadi basis kehidupan masyarakat local dalam mempertahankan kehidupannya. Ekonomi kerakyatan ini dikembangkan berdasarkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat lokal dalam mengelola lingkungan dan tanah mereka secara turun temurun. Aktivitas ekonomi kerakyatan ini terkait dengan ekonomi subsisten antara lain pertanian tradisional seperti perburuan, perkebunan, mencari ikan, dan lainnnya kegiatan disekitar lingkungan alamnya serta kerajinan tangan dan industri rumahan. Kesemua kegiatan ekonomi tersebut dilakukan dengan pasar tradisional dan berbasis masyarakat, artinya hanya ditujukan untuk menghidupi dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya sendiri. Kegiatan ekonomi dikembangkan untuk membantu dirinya sendiri dan masyarakatnya, sehingga tidak mengeksploitasi sumber daya alam yang ada.

Menurut Guru Besar, FE UGM (alm) Prof. Dr. Mubyarto, *sistem Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Dalam prakteknya, ekonomi kerakyatan dapat dijelaskan juga sebagai ekonomi jejaring (network) yang menghubungkan sentra-sentra inovasi, produksi dan kemandirian usaha masyarakat ke dalam suatu jaringan berbasis teknologi informasi, untuk terbentuknya jejaring pasar domestik diantara sentra dan pelaku usaha masyarakat.*⁶

Ekonomi kerakyatan memang bukanlah sebuah mazhab ekonomi baru, namun Ia hanya sebagai melainkan suatu konstruksi pemahaman dari realita ekonomi yang umum terdapat di negara berkembang. Ekonomi rakyat tumbuh secara natural karena adanya sejumlah potensi ekonomi disekelilingnya. Perlu dipahami bahwa dalam

⁶ <http://succesary.wordpress.com/2008/12/10/sistem-ekonomi-kerakyatan/>

ruang ekonomi nasional pun terdapat sejumlah aktor ekonomi (konglomerat) dengan bentuk usaha yang kontras dengan apa yang diragakan oleh sebagian besar pelaku ekonomi rakyat. Memiliki modal yang besar, mempunyai akses pasar yang luas, menguasai usaha disetiap penjuru pasar, menguasai teknologi produksi dan menejemen usaha modern. Namun mereka tidak digolongkan dalam ekonomi kerakyatan, karena jumlahnya hanya sedikit sehingga tidak merupakan representasi dari kondisi ekonomi rakyat yang sebenarnya.

Lahirnya sejumlah pengusaha besar (konglomerat) yang bukan merupakan hasil derivasi dari kemampuan menejemen bisnis yang baik menyebabkan fondasi ekonomi nasional yang dibangun berstruktur rapuh terhadap persaingan pasar. Mereka tidak bisa diandalkan untuk menopang perekonomian nasional dalam sistem ekonomi pasar. Padahal ekonomi pasar diperlukan untuk menentukan harga yang tepat (*price right*) untuk menentukan posisi tawar-menawar yang imbang. Perlu digaris bawahi bahwa yang patut mendapat kesalahan terhadap kegagalan pembangunan ekonomi nasional selama rezim orde baru adalah implementasi kebijakan pembangunan ekonomi nasional yang tidak tepat dalam sistem ekonomi pasar, bukan ekonomi pasar itu sendiri. Dalam pemahaman seperti ini, saya merasa kurang memiliki justifikasi empirik untuk mempertanyakan kembali sistem ekonomi pasar, lalu mencari suatu sistem dan paradigma baru di luar sistem ekonomi pasar untuk dirujuk dalam pembangunan ekonomi nasional.⁷

Sebagai daerah agraris, sektor pertanian memiliki peranan yang sangat strategis dalam pembangunan daerah. Pentingnya sektor pertanian diantaranya sebagai andalan mata pencarian sebagian besar masyarakat, sumbangannya terhadap PDB (*Produk Domestik Bruto*), bahan baku industri, serta dalam penyediaan bahan pangan dan gizi. Beberapa sektor pertanian juga terbukti mampu menjadi penyangga perekonomian saat terjadinya krisis ekonomi.

Ekonomi yang digerakkan oleh usaha-usaha rakyat, terutama usaha kecil dan menengah yang dilakukan oleh rakyat banyak, untuk kemudian hasilnya akan kembali kepada rakyat. Karena sifatnya yang merata, persebaran modal yang baik, sistem ekonomi yang benar-benar bergerak dalam sektor riil, ekonomi rakyat mempunyai dampak pemerataan terhadap pendapatan yang baik, dan mampu menggerakkan sektor riil secara efektif.

Berdasarkan hal tersebut, nampaknya titik fokus ekonomi rakyat adalah bagaimana memberdayakan rakyat dalam perekonomian dan keberpihakan ekonomi kepada rakyat, memastikan tidak terjadinya ketidakadilan ekonomi karena adanya perlakuan yang tidak sama antara pemilik modal besar dengan rakyat sehingga timbul ketimpangan ekonomi.

Perlu diingat bahwa ekonomi kerakyatan tidak akan mewujudkan pembangunan ekonomi yang maju, jika ekonomi kerakyatan hanya sekedar komitmen politik untuk

⁷ Fredrik Benu, *Ekonomi Kerakyatan Dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat: Suatu Kajian Konseptual*, Makalah Seminar Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Provinsi NTT, Kupang, tanggal 26 Nopember 2002.

merubah kecenderungan dalam sistem ekonomi kapitalis yang amat membela kaum pengusaha besar khususnya para konglomerat. Akan tetapi pelaksanaan perubahan itu harus diiringi dengan implementasi dengan benar-benar memberi perhatian utama kepada rakyat kecil lewat program-program operasional yang riil dan mampu merangsang kegiatan ekonomi produktif ditingkat rakyat sekaligus memupuk jiwa kewirausahaan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa membangun ekonomi kerakyatan membutuhkan adanya komitmen politik (*political will*), tetapi menyamakan ekonomi kerakyatan dengan praktek membagi-bagi uang kepada rakyat kecil, adalah sesuatu kekeliruan besar dalam perspektif ekonomi kerakyatan yang benar. Praktek membagi-bagi uang kepada rakyat kecil sangat tidak menguntungkan pihak manapun, termasuk rakyat kecil sendiri (Bandingkan dengan pendapat Ignas Kleden, 2000). Pendekatan seperti ini jelas sangat berbeda dengan apa yang dimaksud dengan *affirmative action*. Aksi membagi-bagi uang secara tidak sadar menyebabkan usaha kecil-menengah dan koperasi yang selama ini tidak berdaya untuk bersaing dalam suatu mekanisme pasar, menjadi sangat tergantung pada aksi dimaksud.

Sebenarnya yang harus ada pada tangan obyek *affirmative action* adalah kesempatan untuk berkembang dalam suatu mekanisme pasar yang sehat, bukan *cash money/cash material*. Jika pemahaman ini tidak dibangun sejak awal, maka saya khawatir cerita keberpihakan yang salah selama masa orde baru kembali akan terulang. Tidak terjadi proses pendewasaan (*maturity*) dalam ragaan bisnis usaha kecil-menengah dan koperasi yang menjadi target *affirmative action policy*. Bahkan sangat mungkin terjadi suatu proses yang bersifat *counter-productive*, karena asumsi awal yang dianut adalah usaha kecil-menengah dan koperasi yang merupakan ciri ekonomi kerakyatan Indonesia tumbuh secara natural karena adanya sejumlah potensi ekonomi disekelilingnya. Mulanya mereka tumbuh tanpa adanya insentif artifisial apapun, atau dengan kata lain hanya mengandalkan naluri usaha dan kelimpahan sumberdaya alam, sumberdaya manusia, serta peluang pasar. Modal dasar yang dimiliki inilah yang seharusnya ditumbuhkembangkan dalam suatu mekanisme pasar yang sehat. Bukan sebaliknya menghilangkan sesuatu yang tadinya menjadi modal dasar dengan menciptakan ketergantungan sistem baru yang kebijakannya cenderung keberpihakan yang pada finisnya menambah kesengsaraan bagi rakyat. Selanjutnya, pemerintah harus sudah mempunyai plening yang pasti tentang kapan seharusnya pemerintah mengurangi bentuk campur tangan dalam *affirmative action policy*nya, untuk mendorong ekonomi kerakyatan berkembang secara sehat.

Sebenarnya antara ekonomi kerakyatan dan ekonomi Islam tak ada pertentangan. Jika yang dimaksud kerakyatan adalah pemberdayaan dan keberpihakan terhadap rakyat hal tersebut senada dengan ruh Islam yang memerangi monopoli. Juga sebaliknya Islam yang ingin ada pemerataan kesejahteraan sangat berkepentingan untuk memberdayakan rakyat. Islam adalah ruh dan nilai dari kegiatan dan sistem ekonomi bangsa. Sistemnya bisa ekonomi kerakyatan atau yang lainnya. Aplikasinya bisa disesuaikan keadaan. Karena pada dasarnya harta kekayaan merupakan sarana untuk meningkatkan hubungan baik dengan Allah dan meningkatkan kebaikan

kepada sesama makhluk,⁸ meskipun untuk meraihnya diperlukan usaha yang sungguh-sungguh dengan memerangi kebodohan dan kemalasan. Keduanya memiliki kesamaan berupa pemerataan kesejahteraan.

Rakyat bisa mendapatkan tempat tinggal yang baik, fasilitas kesehatan dan pendidikan yang terjangkau, kebutuhan pangan yang tidak menyulitkan serta kebutuhan-kebutuhan primer masyarakat terpenuhi⁹. Itulah setidaknya letak keberpihakan pemerintah yang paling minimal, kemudian potensi kekayaan masyarakat tersebut dioptimalkan. Jika porsi optimalisasi ini maksimal maka akan menjadi sebuah ekonomi nasional yang kuat dan mapan.

G. Strategi Ekonomi Kerakyatan (SEK) Menghadapi ASEAN *Economic Community* (AEC) 2015

Prinsip-prinsip dasar dari sistem ekonomi kerakyatan, secara teori terdapat keselarasan antara sistem ekonomi kerakyatan dengan ekonomi Islam. Sebab prinsip-prinsip dari ekonomi Islam itu sendiri adalah harus mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan dan kekeluargaan, keterbukaan serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya demi kemaslahatan ummat, juga menganut prinsip universalitas yaitu prinsip yang tidak membedakan suku, agama, ras dan golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip Islam sebagai *rahmatan lil'alamiin*. Lalu kenapa Indonesia masih tertinggal jauh bahkan terpuruk secara ekonomi di banding dengan negara-negara yang lain? padahal Indonesia telah memiliki suatu sistem ekonomi yang baik yang selaras dengan sistem ekonomi Islam yang telah terbukti menjadi solusi ampuh ketika mayoritas negara didera oleh krisis moneter yang berkepanjangan di masa lalu? Jawabannya adalah karena kita masih belum mau mengaplikasikan sistem ekonomi tersebut secara utuh, konsisten sesuai dengan prinsip-prinsip dan tujuan dari sistem ekonomi tersebut.

Deklarasi Bangkok tahun 1967 merupakan awal dimulainya kerja sama ekonomi negara-negara *ASEAN* yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan budaya dikalangan negara-negara *ASEAN*. Pada bulan Januari 2007, disepakati untuk mempercepat pencapaian *ASEAN Economic Community* (AEC) yang semula tahun 2020 menjadi tahun 2015. Diberlakukannya *ASEAN Economic* (AEC) 2015 dan pasar bebas Asia Pasifik, membuat setiap negara menyiapkan diri untuk menyongsongnya, tidak terkecuali Indonesia. Sudah siapkah Indonesia? Siap tidak siap, harus siap. Mau tidak mau kita harus mempersiapkan diri dalam waktu singkat ini.

Salah satu cara untuk menjawab tantangan tersebut anatara lain memperkuat sistem ekonomi kerakyatan dengan berlandaskan ekonomi Islam. Dengan rencana strategis

⁸ DR. Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, Cet. I, Jakarta: Rabbani Perss, 1997, hal.90.

⁹ Abdullah Nasih Ulwan, *at-Takaful al-Ijtima'iy fi al-Islam*, Cairo: Maktabah Usrah, 2001, hal.19.

serta dengan konsepsi pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ekonomi ini akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, serta stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Pengembangan ekonomi kerakyatan perlu diarahkan kepada perubahan struktural yakni dengan memperkuat kedudukan dan peran ekonomi kerakyatan dalam perekonomian nasional. Dan mengikuti perkembangan terkini dan wawasan jauh ke depan, sehingga diharapkan terjadi proses perubahan dari tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan (*defedency*) kepada kemandirian (*indefedency*).

Perubahan budaya yang besar diperlukan dalam membangun ekonomi masyarakat. Walaupun pemerintah pusat maupun daerah telah menjalankan program ekonomi kerakyatan, namun satu loncatan tinggi perlu dibuat untuk menyeberangi jurang yang memisahkan budaya petani dan bedagang kecil-kecilan kepada budaya masyarakat komersial yang canggih. Program ekonomi kerakyatan yang dibuat dengan memberikan modal kepada masyarakat hendaknya diiringi dengan perencanaan, pembinaan dan pengawasan agar usaha yang dijalankan oleh masyarakat tidak menjadi “*pedagang buluh kasab, ujung hilang pangkal lesap*”. Sehingga dengan perencanaan, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan akan tercipta pembangunan ekonomi yang maju serta dapat mengangkat taraf hidup masyarakat, terlepas dari belenggu kemiskinan dan kesengsaraan. Tanggungjawab membangun dan memajukan ekonomi suatu daerah atau negeri bukan hanya terletak pada bahu pemerintah daerah saja, tetapi perlu kerjasama yang jitu dari masyarakat. Karena betapapun perencanaan, pembinaan serta peluang disediakan jika semangat masyarakat masih dalam lingkaran lama/mental untuk meningkatkan taraf perkonomian yang tinggi, maka kejayaan pembangunan ekonomi sukar diwujudkan.

H. Kesimpulan dan Penutup

Akar penyebab dari kemiskinan adalah penerapan sistem ekonomi yang salah dan tidak berimbang baik bagi masyarakat. Sistem ekonomi tersebut adalah sistem ekonomi yang tidak bisa mengakomodir kebutuhan secara inklusif dan hanya dimanfaatkan oleh sekelompok orang. Selain itu tata kelola yang mengenyampingkan norma dan etika berimbang pada sebuah aktifitas ekonomi yang hanya mementingkan kepuasan dengan motif mencari keuntungan semaksimal mungkin seperti yang dipraktekkan oleh sistem ekonomi kapitalis.

Persoalan etika inilah yang menjadi fokus dari sebuah sistem Rabbani/ekonomi Islam. Dalam realitasnya terbukti sistem ekonomi Islam lebih unggul dibandingkan dengan kapitalis dan sosialis dalam fokus pengentasan kemiskinan. Yang menjadi keunggulan dari sistem ekonomi Islam adalah pelarangan riba yang terbukti membawa dampak buruk bagi kesejahteraan masyarakat.

Langkah awal yang kongkrit dalam membangun ekonomi untuk membasmi/merentas kemiskinan dengan konsepsi pemberdayaan masyarakat, yaitu : *Pertama*, menerapkan ekonomi Islam. Sebagian pihak antipati dengan ekonomi Islam, karena

selalu dikaitkan dengan perkembangan politik yang menyamakannya dengan bahaya teroris. Padahal misi yang dibawa ekonomi Islam senada/tidak jauh beda dengan ekonomi kerakyatan. *Kedua*, persiapan mental masyarakat. Penulis mengutip bahasa dari cawapres Ir. H. Joko Widodo yakni “*revolusi mental*”, karena tanggungjawab membangun dan memajukan ekonomi bukan terletak pada bahu pemerintah saja, tetapi perlu kerjasama yang jitu dari masyarakat. Karena betapapun peluang disediakan jika semangat masyarakat masih dalam lingkaran “*tak ade urusan*” (masa bodoh), maka kejayaan pembangunan ekonomi sukar diwujudkan. *Ketiga*, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Usaha memperkuat modal dasar yakni memperkuat potensi sumberdaya manusia (dengan pendidikan/pelatihan) serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Poin ini juga menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di perdesaan, dimana terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya amat kurang. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini.

Daftar Pustaka

- Abimanyu, Anggito, *Ekonomi Indonesia Baru, kajian dan alternatif solusi menuju pemulihan*, (Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000).
- Abdul Qadim Zallum. *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*, cet. I (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002)
- Aulia Pohan. *Potret Kebijakan Moneter Indonesia*, cet. I (Jakarta; Rajawali Pers, 2008)
- Asmuni, "Etika Ekonomi Perspektif al- Maqasid". Dalam Az-Zarqa' III (2):182-212. (Yogyakarta, 2011)
- Ayub, Muhammad, *Understanding Islamic Finance*. (Jakarta: PT. Gramedia, 2007)
- Chapra, M. Umer, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2000)
- Murray N. Rothbard. *What has Government Done to Our Money? (Apa yang Dilakukan Pemerintah Terhadap Uang Kita?)*, cet I (Jakarta; Granit, 2007)
- Nurul, Huda, dll, *Ekonomi Makro Islam, Ekonomi Makro Islam; Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Predana Media Group, 2008)
- Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar*, (Jakarta: LPFEUI, 2005), Edisi Ketiga
- Qardhawi, DR. Yusuf, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, Cet. I, (Jakarta: Rabbani Perss, 1997)
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soeroyo, Jilid I, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995)
- Soediyono, Reksoprayitno, *Ekonomi Makro Analisis IS-LM dan Permintaan Penawaran Agregatif*, (Yogyakarta: BPFE, 2000)
- <http://riau.bps.go.id>.